Wacana – *Vol. 17, No. 1(2014)*

ISSN : 1411-0199
E-ISSN : 2338-1884

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Hadi Suroso[1.2], Abdul Hakim[1.3], Irwan Noor[1.3]

[1]Program Magister Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
[2]Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
[3] Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat derajat partisipasi atau kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan masyarakattersebut. Metode yang digunakan peneliti ialah kuantitatif eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik masih sampai pada anak tangga Penentraman yaitu tangga ke lima dari delapan anak tangga partisipasi masyarakat Arnstein atau masih dalam derajat Pertanda Partisipasi (*Degrees of Tokenism*). Dari beberapa faktor internal dan eksternal yang diuji menunjukkan bahwa faktor usia, tingkat pendidikan,jenis pekerjaan, komunikasi dan kepemimpinan mempunyai hubungan dengan partisipasi masyarakat.Sementara,tingkat penghasilan dan lamanya tinggal didesa tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan derajat partisipasi. Hal ini menunjukkan ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes bila di lihat dari tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan. Sementara,tingkat penghasilan dan lamanya tinggal masyarakat didesa menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kata kunci: Perencanaan pembangunan partisipatif, derajat partisipasi, musrenbangdes

Abstract

This study is aimed to look at the degree of participation or community-owned power in the decision-making process of Musrenbangdes and also to determine the factors that affect the activity of the community. The researcher applied quantitative – explanationmethod. The results show that the degree of community participation in development planning through Musrenbangdes in the Banjaran village, Driyorejo, Gresik is still on the Placation stages. It is on the5thof the 8th steps of community participation in Arnstein theory or in the Degrees of Tokenism. The study found that there areno differences in the level of community participation in rural development planning through Musrenbangdes in terms of the level of education, communication, age, occupation and level of leadership. Meanwhile, there are no differences in the level of community participation in development planning according to factors such as incomelevel and length of residence in a rural community.

Keywords: Participatory Planning, degree of participation, Musrenbangdes

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah mendorongpenyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan tersebut membawa konsekuensi diperlukannya koordinasi dan pengaturan untuk menyelaraskan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah maupun antar daerah. Atas dasar kebutuhan ini, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Undang-Undangyang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 [1].

Dua pendekatan dalam SPPN adalahperencanaan pembangunan partisipatif atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) partisipatif. Pendekatan jenis kedua bermaksud untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan

Alamat Penulis:
Hadi Suroso
Email : hadisbaya@gmail.com
Alamat : Gubeng Airlangga VII No. 10 Surabaya

inidilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa [1]. Pada tingkat desa, musyawarah ini disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes memberikesempatan luas bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan membahas permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya di tingkat desa untuk dibawa ditingkat Musrenbang kecamatan dan selanjutnya dibawa ke Musrenbang kabupaten maupun provinsi. Tetapi, dalam realitanya, pelaksanaan konsep ini tidak selamanyaberjalan sesuai dengan arahan, semangat dan tujuan awal diselenggarakan Musrenbangdes ini.

Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai Musrenbangdes sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam Musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite desa/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan [2]. Rendahnya sosialisasi dari pemerintah tentang Musrenbang terutama di tingkat desa/kelurahan serta sikap apatisme masyarakat yang tinggi, karena usulan yang diberikan masyarakat kurang diperhatikan atau didengarkan, menyebabkan masyarakat merasa tidak perlu ikut serta dalam proses Musrenbang [3]. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adabeberapa faktor lain baik yang bersifat internal maupun eksternal juga memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat baik yang bersifat mendukung atau menghambat keberhasilan suatu program pembangunan [4].

Secara umum, masyarakat Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik telah melakukan Musrenbangdes sebagai forum yang melibatkan beberapa komponen masyarakat mulai dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta tokoh mayarakat untuk merencanakan pembangunan desa.

Namun, tahapan awal pelaksanaan Musrenbangdes, yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun atau Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) belum sepenuhnya dilakukan. Disamping itu, forum musyawarah hanya didominasi sebagian orang yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Selebihnya hanya datang dan mendengarkan saja sehingga partisipasi yang terjadi belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar kekuasaan (*power*) atau derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes, dan untuk mengetahui hubungan aktifitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dengan beberapa faktor internal dan eksternal yang mempenaruhinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam menggali data. Populasi yang diteliti ialah elemen masyarakat 107 orang yang pernah terlibat langsung dalam pelaksanaaan Musrenbang Desa di Desa Banjaran, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik selama tahun 2012 / 2013.

Peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif untukmenganalisis data derajat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. Untuk melihat ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor eksernal dan internal dengan keaktifan berpartisipasi masyarakat, peneliti menggunakan analisis statistik dengan tabel kontingensi dengan statistik uji *chi-square.* Uji *chi-square* digunakan untuk mencari apakah ada hubungan (*asosiasi*) antar variabel sedangkan koefisien kontingensi digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan dua variabel yang diuji [5].

Hipotesis yang digunakan dalam uji *chi-square* ialah sebagai berikut :

H_0: Kedua variabel tidak ada hubungan (bebas satu sama lain)

H_1: Kedua variabel tidak saling bebas (saling mempengaruhi)

Keputusan tolak atau terima H_0 tergantung nilai hitung *chi square* atau nilai probabilitas yang dihasilkan. Bila nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka H_0 ditolak artinya pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak. Sebaliknya jika nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka H_0 diterima artinya pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Desa Banjaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan delapan anak

tangga Arnstein [6], maka pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Banjaran hanya sampai pada anak tangga ke lima yaitu Penentraman, belum sampai pada anak tangga ke enam yaitu Kemitraan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut (Tabel 1).

Pada tangga Manipulasi: sebagian besar responden tidak setuju bila dinyatakan bahwa Musrenbangdestidak berdasarkan musyawarah, hanya seremonial belaka, bersifat manipulasi untuk sekedar datang dan hanyamenyetujui apa yang sudah diputuskan pemerintah.

Pada tangga Terapi dan Informasi: sebagian besar responden tidak setuju atas pernyataan bahwa pemerintah lah yangmenentukan semua kebijakan, hanya beberapa saja rancangan kegiatan yang dikomunikasikan dan itupun sangat terbatas dan bersifat searah. Karena, kenyataannya pemerintah telah menyampaikan semua informasi tentang pembangunan yang sudah dan akandilaksanakan. Disamping itu, semua rencana pembangunan desa yang diusulkan merupakan aspirasi murni masyarakat, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja.

Pada tangga Konsultasi: sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa Musrenbangdes memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan. Namun, responden meragukan bahwa pemerintah menjamin penerimaan usulan tersebut. Untuk itu responden berharap agarsetiap perwakilan yang diundang dapat menyiapkan usulan kegiatan dan program untuk dibahas dan diusulkan ke Musrenbang level yang lebih tinggi.

Pada tangga Penentraman: sebagian besar responden setuju terhadap pernyataan bahwa penentuan usulan kegiatan atau program yang akan dibahas padapada musrenbang yang lebih tinggi dilakukan di tingkat Musrenbangdes secara demokratis.

Di tahap ini, responden bersikap pasrah dan berharap usulan mereka yang dihasilkan melalui Musrenbangdes dapat diterima dan disetujui.Responden memahami bahwa pihak yang menentukan layak tidaknya usulan tersebut ialah pemerintah kabupaten.

Pada tangga Kemitraan, yaitu Pendelegasian kekuasaan dan Pengendalian warga: sebagian besar responden tidak setuju pada pernyataan bahwadalam pelaksanaan Musrenbangdes masyarakat memiliki peranbesardalam proses pengambilan keputusan atasusulan-usulan program. Menurut responden, pihakyang menentukan kelayakan usulan kegiatan untuk dijadikan program kegiatan pembangunan adalah Musrenbang pada level yang lebih tinggi.

Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

No.	Indikator Partisipasi	Tidak setuju (persen)	Tidak tahu (persen)	Setuju (persen)	Keterangan
1.	Tidak ada dialog atau musyawarah, semuanya sudah ditentukan pemerintah	92,52	7,48	-	Manipulasi
2.	Semua sudah ditentukan dari pemerintah dan hanya beberapa saja rancangan kegiatan yang disampaikan serta tidak ada dialog untuk menanggapi.	90,65	9,35	-	Terapi
3.	Semua sudah ditentukan dari pemerintah dan semua rancangan kegiatan juga disampaikan tetapi tetap tidak ada dialog untuk menanggapi.	86,92	13,08	-	Informasi
4.	Masyarakat dipersilakan memberikan usulan, walaupun tidak dijamin untuk diterima	7,48	11,21	81,31	Konsultasi
5.	Semua usulan diterima, namun usulan tersebut tetap dinilai kelayakannya oleh pemerintah untuk dilaksanakan.	20,56	8,41	71,03	Penentraman
6.	Masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembangunan desa.	92,52	7,48	-	Kemitraan
7.	Pemerintah memberikan kewenangan dalam merancang, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, masyarakat diberi tanggung jawab penuh.	90,65	9,35	-	Pendelegasian Kekuasaan
8.	Masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama. Peran masyarakat lebih besar dibandingkan peran pemerintah.	90,65	9,35	-	Kendali Warga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbangdes yang diselenggarakan di Desa Banjaran tidak hanya sekedar pertemuan yang bersifat seremonial belaka, tetapi benar-benar telah dijadikan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat desa tersebut. Semua usulan yang dibawa ke forum Musrenbangdes adalah murni aspirasi dari warga, bukan berasal dari kemauan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian dipaksakan untuk disetujui masyarakat dalam Musrenbangdes.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Musrenbangdes juga telah dijadikan wadah bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan semua kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan. Hal ini mendukung perlunya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, yaitu bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi alat untukmemperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan dan persiapan juga dapat meningkatkan derajat kepercayaandan rasa memiliki masyarakat atas proyek atau program pembangunan yang sedang dilakukan [7].

Namun demikian, walaupun masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, semua keputusan yang berupa usulan kegiatan tidak sepenuhnya bisa disetujui oleh pemerintah kabupaten untuk dilaksanakan. Keputusan Musrenbangdes tersebut masih melalui proses Musrenbang pada level yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Usulan masyarakat desa masih akan dikaji oleh tim dari Kabupaten berdasarkan skala prioritas, sehingga penilaian kegiatan akan dilakukan secara integrative meliputi kebutuhan, kelayakan maupun anggaran yang tersedia. Hingga tahap ini, masyarakat Banjaran hanya bisa pasrah dan berharap agar usulan tersebut menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten untuk dilaksanakan. Karena alasan ini, jika dikaitkan dengan delapan anak tangga Arnstein,proses Musrenbangdes di Desa Banjaranhanya sampai pada anak tangga ke lima yaitu Penentraman, belum sampai pada anak tangga ke enam yaitu Kemitraan. Dalam anak tangga Kemitraan pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar, pemerintah dan masyarakat bekerja sama baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Realitanya, dalam Musrenbangdes masyarakat hanya punya hak untuk mengusulkan kegiatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Desa Banjaranmasih sampai pada derajat Pertanda Partisipasi (*Degrees of Tokenism*). Pada tingkat ini, masyarakat tetap didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa usulan mereka akan dipertimbangkan oleh pemerintah [8].

Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes ini juga mengindikasikan adanya keterlibatan masyarakat dalam administrasi publik. Hal inimenjadi prasyaratpenting dalam pemerintahan yang bercirikan demokratis. Dalam perspektif administrasi publik, kedudukan warga negaraadalah penting sebagaipendorong dinamikaperkembangan sistem pemerintahan yang demokratis, serta membawa nilai-nilai fundamentalyang mendudukkan warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Implikasinya, pemerintahan harus dibangun darirakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government from the people, by the people and for the people*). Denganperkataan lain, pemerintahan harus dibangundengan cara-cara atau nilai-nilai yang demokratis [9].

2. Analisis Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal (terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, lamanya tinggal) dan faktor eksternal (terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan). Berikut ini adalah uraian hasil uji hipotesis berdasarkan metode Chi Square.

a. Usia

Hasil uji *chi*-squareyang ditunjukkan oleh Tabel 2 menyarankan peneliti untuk menolak H_0 dan menyimpulkan adanya hubungan antara keaktifan berpartisipasi masyarakat dengan usia. Hasil ini menunjukkanbahwa ada perbedaan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bila dilihat dari usia.Perbedaan tersebut dapat diamati dari gambar 1.

Menurut Gambar 1, responden kelompok usia 41-50 tahun memiliki keaktifan

berpartisipasi yang relatif lebih tinggi dibanding pada kelompok usia muda (dibawah 41 tahun) dan kelompok tua (diatas 50 tahun). Rendahnya partisipasi kelompok muda ini diduga dikarenakan oleh masih ada rasa sungkan terhadap para orang tua yang dianggap senior. Responden usiamuda, terutama dari wakil karang taruna, jarang sekali ikut menghadiri undangan Musenbangdes.

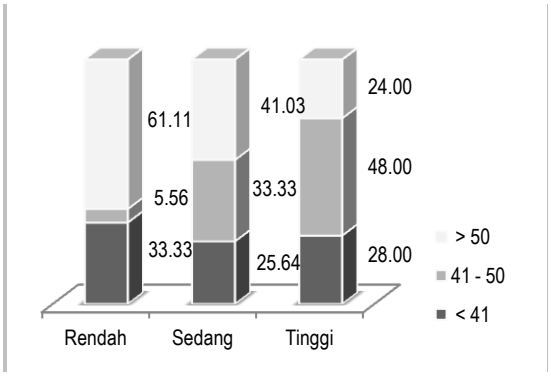

Gambar 1. Keaktifan Berpartisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Menurut Kelompok Usia

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Chi Square untuk Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal dan Eksternal	*Pearson Chi-Square*	χ^2	*Asymp. Sig. (2-sided)*	*Conti-ngency Coeffi-cient*
a. Usia	12,410	9,488	0,015*	0,322
b. Tingkat Pendidikan	19,934	9,488	0,001*	0,396
c. Jenis Pekerjaan	9,894	9,488	0,042*	0,291
d. Tingkat Penghasilan	8,228	9,488	0,084	0,267
e. Lama tinggal diDesa Banjaran.	6,079	9,488	0,193	0,232
f. Komunikasi	16,734	9,488	0,002*	0,368
g. Kepemimpinan	9,692	5,991	0,008*	0,288

*) Tolak H0.

Hasil ini menunjukkan bahwa golongan tua dianggap lebih berpengalaman atau senior. Para senior ini lebih banyak memberikan pendapat baik berupa masukan, saran atau dalam hal menetapkan keputusan [10].

b. Tingkat Pendidikan

Hasil pengujian *chi-square*faktortingkat pendidikan dan keaktifan berpartisipasi masyarakat menyarankan peneliti untuk menolak H_0, dan menyimpulkanbahwa masyarakat dengan pendidikan tertentu mempunyai kecenderungan memiliki keaktifan berpartisipasi tertentu pula.

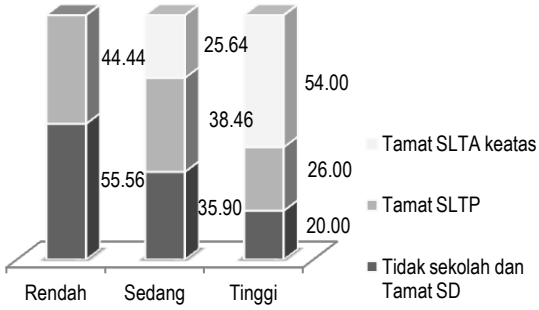

Gambar 2. Keaktifan Berpartisipasi Masyarakat dalam MusrenbangdesMenurut Tingkat Pendidikan

Gambar 2 mengilustrasikan bahwa sebagian besar masyarakat yang tergolong aktifitas partisipasinya tinggi berurutan ialah mereka yang tamat SLTA keatas, kemudian tamat SLTP dan keaktifan berpartisipasi rendah ditunjukkan oleh masyarakat yang berlatar belakang tamat SD dan tidak sekolah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi latar belakang pendidikan masyarakat, semakin tinggi keaktifan berpartisipasidalam Musrenbangdes di Desa Banjaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan [10].

c. Jenis Pekerjaan

Hasil pengujian hipotesis nol bahwa tidak ada hubungan antara jenis pekerjaan dan keaktifan partisipasi masyarakat menghasilkan keputusan metolak H_0. Artinya, ada perbedaan keaktifan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bila dilihat dari jenis pekerjaan responden. Implikasi hasil uji ini adalah bahwa biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akanlebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan tertentu [11].

Mengacu pendapat Plumer, masyarakat Desa Banjaran yang bekerja di sektor pertanian memiliki keaktifan berpartisipasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja di sektor industri. Relatif rendahnya partisipasi masyarakat yang bekerja di sektor industri inididuga karenakendala jam kerja di tempat mereka bekerja. Di sektor pertanian jam kerjanya

lebih fleksibel jika dibanding jadwal kerja di sektor industri. Hal ini mengakibatkan tingkat kehadiran masyarakat yang bekerja disektor industry rendah karena jadwal bekerja berbenturan dengan waktu pelaksanaan Musrenbangdes.

d. Tingkat Penghasilan

Pengujian hubungan antara tingkat penghasilan dan keaktifan berpartisipasi masyarakat menghasilkan keputusan untuk menerima H_0, atau tidak ada hubungan yang berarti antara tingkat penghasilan dengan keaktifan berpartisipasi masyarakat. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan partisipasi aktif masyarakat Desa Banjaran dalam mengikuti Musrenbangdes bila dilihat dari tingkat penghasilan masyarakat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang pernah ada. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Asumsi umum adalah masyarakat yang memiliki penghasilan cukup akanlebih memiliki waktu luang dan tidak disibukkan lagi mencari tambahan penghasilan, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuandesa [10]. Hasil penelitian di Desa Banjaran ini berbeda diduga karena tingkat pendapatan responden cenderung homogen, dengan jenis pekerjaan relatif samayaitu sebagian besar terdiri dari para petani dan buruh pabrik. Dari Gambar 3 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat penghasilan antara 1.250.000 – 1.749.000 rupiah yaitu mencapai 61,6 persen.

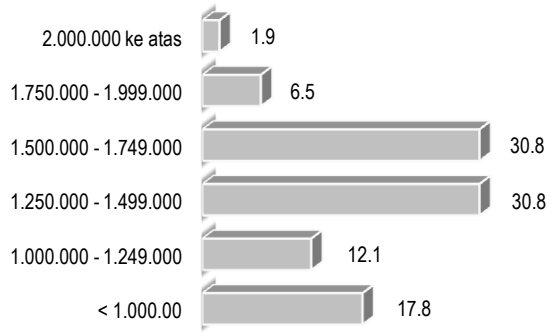

Gambar 3. Peserta Musrenbangdes menurut Tingkat Penghasilan

e. Lamanya tinggal di Desa Banjaran

Hasil uji *chi-square*terhadap hubungan antara keaktifan berpartisipasi dan lamanya tinggal di Desa Banjaranmenunjukkan penerimaan H_0. Ini berarti bahwa lama tinggal seseorang di Desa Banjaranbelum tentu menentukan keaktifannya untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes.

Deskripsi dari Gambar 4 juga mengindikasikan tidak adanya perbedaan keaktifan berpartisipasi dilihat dari lamanya tinggal di Desa Banjaran.Masyarakatkelompok lama yang tinggal kurang dari 25 tahun dan mereka yang telah tinggal lebih dari 46 tahun cenderung memiliki aktifitas partisipasi yang tinggi.Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan partisipasi antara mereka yang lama tinggalnya kurang dari 25 tahun dan yang lebih dari 46 tahun.

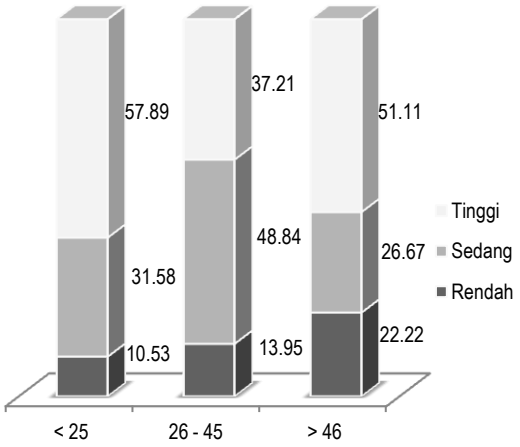

Gambar 4. Keaktifan Berpartisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Menurut Lamanya Tinggal.

Kelompok yang tinggal kurang dari 25 tahun sebagian besar adalahwarga pendatang yang berusia diatas 45 tahun dan berpendidikan diatas SLTP. Sebagian besar mereka ialah buruh pabrik yang bekerja di sekitar Desa Banjaran. Sehingga seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan usia diatas 45 tahun dan pendidikan yang relatif tinggi tersebut memang memiliki keatifan berpartisipasi yang tinggi pula.

Menyimak pada hasil pengujian hipotesis diatas dan fenomena yang ada di Desa Banajaran ternyata memberikan gambaran yang berbeda jika dibanding dengan pendapat-pendapat sebelumnya, bahwa lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut dapat mempengaruhi partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tersebut maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung

lebih meningkatkan partisipasinya dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut [12].

f. Tingkat Komunikasi

Hasil pengujian terhadap hubungan antara faktor komunikasi dan keaktifan berpartisipasi masyarakat ternyata menghasilkan nilai untuk menolak H0. Hal ini menandakan ada hubungan antara tingkat komunikasi dan keaktifan berpartisipasi masyarakat sehingga masyarakat dengan tingkat komunikasi tertentu mempunyai kecenderungan memiliki aktifitas partisipasi tertentu pula.

Dalam gambar 5secara umum dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki keaktifan berpartisipasi rendah ternyata hanya sebagian kecil saja yang memiliki tingkat komunikasi tinggi, sedangkan mereka tergolong memiliki keaktifan berpartisipasi tinggi sebagian besar juga memiliki tingkat komunikasi yang tinggi pula.

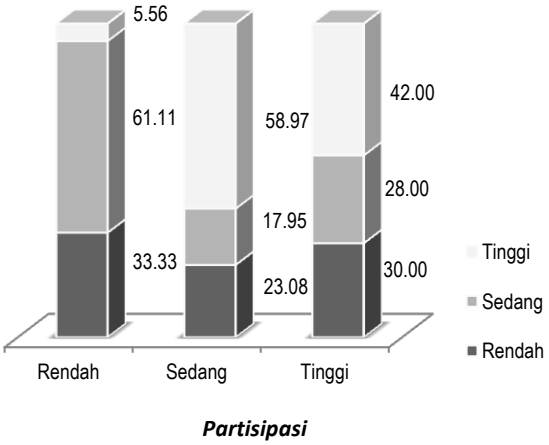

Gambar 5. Keaktifan Berpartisipasi Masyarakat dalam MusrenbangdesMenurut Tingkat Komunikasi.

Adanya hubungan antara keaktifan berpartisipasi masyarakat dengan tingkat komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat [12].

g. Kepemimpinan

Pengujian hubungan antara kepemimpinan dan keaktifan berpartisipasi masyarakat menghasilkan keputusan untuk menolak H0, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat dengan tingkat kepemimpinan tertentu mempunyai kecenderungan memiliki keaktifan berpartisipasi dalam Musrenbangdes tertentu pula. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes bila dilihat dari tingkat kepemimpinannya.

Pada gambar 6 terlihat bahwa ada kecenderungan semakin tingggi tingkat kepemimpinan yang dimiliki peserta Musrenbangdes maka semakin tinggi pula keaktifan berpartisipasi.

Dari hasil pengujian diatas dan mengamati data yang ada menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepemimpinan di Desa Banjaran sudah cukup mampu dalam mengenali dan menjaring kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat Desa Banjaran serta mampu menyalurkan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kegiatan yang diputuskan dalam Musrenbangdes.

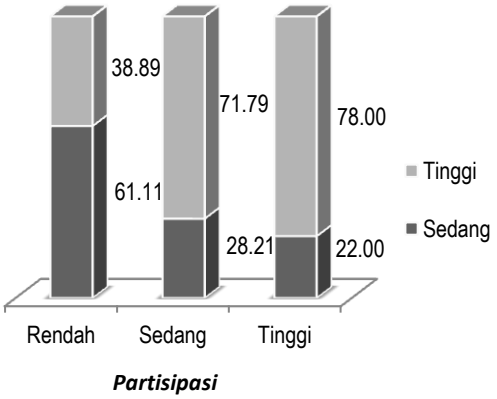

Gambar 6. Aktifitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes Menurut Tingkat Kepemimpinan

Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi masyarakat karena mereka akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan jika ada tanggapan yang positif dan menguntungkan mereka. Hal menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan menghimbau bawahannya, dan harus memiliki keterbukaan terhadap pandangan-pandangan baru, tanggap atas keperluan bawahannya, serta mendukung pelaksanaan inovasi. Selain itu juga bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas para anggota kelompok [13]. Dari dua pendapat ini jelaslah bahwa kehadiran seorang pemimpin sangatlah penting dalam mempengaruhi dan menghimbau masyarakat

atau warga agar berperan serta secara aktif dalam pembangunan di desanya.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* terhadap lima faktor internal dan dua faktor eksternal yaitu tingkat komunikasi dan kepemimpinanyang diduga berhubungan terhadap keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes ternyata hanya usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan tingkat komunikasi dan kepemimpinan yang mempunyai hubungan, sedangkan tingkat penghasilan dan lamanya tinggal dalam desa tidak mempunyai hubungan dengan keaktifan berpartisipasi masyarakat.

Hasil diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan masing-masing memiliki hubungan dengan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran. Ini berarti ada perbedaan keaktifan berpartisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes di Desa Banjaran bila di lihat dari tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan.

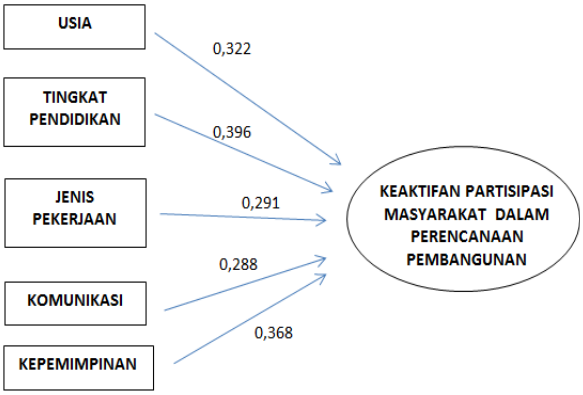

Gambar 7. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Keaktifan Berpartisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Telah ada peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Banjaran. Hal ini menunjukkan adanya dalam administrasi publik dan ini sangatpenting dalam pemerintahan yang bercirikan demokratis.
2. Derajat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran baru mencapai pada anak tangga yang kelima yaitu tangga Penentraman, atau masih sampai pada derajat Pertanda Partisipasi (*Degrees of Tokenism*),
3. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran masih relatif sedangkarena keaktifan partisipasi relative masih rendah. Hal ini dilihat dari rendahnya kemampuan masyarakatdalam memberikan data, minimnya usulan yang datang dari warga, serta masih adanya respon pasif peserta musyawarah atas usulan yang muncul dari peserta lain.
4. Tingkat pendidikan, tingkat komunikasi,usia, jenis pekerjaan dan tingkat kepemimpinan masing-masing memiliki hubungan dengan keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbangdes di Desa Banjaran.Sementara,tingkat penghasilan dan lamanya tinggal didesa tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhipartisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, maka perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perangkat desa perlu melakukan pendekatan yang lebih serius dan mempertimbangkan jadwal yang tepatuntuk meningkatkan jumlah masyarakat yang hadir dalam Musrenbangdes.
2. Perlu peningkatan frekuensi dan memilih media yang tepat untuk sosialisasi pelaksanaan Musrenbangdes.
3. Perangkat desa perlu memperbaiki dan menyiapkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa, agar perencanaan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang serta Kepala Pusdiklat BPS yang telah memberikan ijin untuk tugas belajar. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya dan seluruh rekan.Semoga sukses semua.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.

[2]. Purnamasari, Irma. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Magister Tesis* Universitas Dipnegoro. Semarang.

[3]. Pasaribu, Jhonson 2010. "Kajian Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Peranan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Sumbul (Dairi)" *Jurnal online Universitas Darma Agung*. Medan

[4]. Girsang, Lisbet Juwita. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Mayarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Megamendung, Bogor). *Magister Tesis* Institut Pertanian. Bogor

[5]. Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2006. Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

[6]. Arnstein, Sherry R. 1969. "A *Ladder of Citizen Participation"* https://www.planning.org/pas/memo/2007/mar/pdf/JAPA35No4.pdf. Diakses pada 29 Juli 2013.

[7]. Conyers, Diana. 1994 .*Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar* Edisi 2. Terjemahan Setiawan dan Affan Ghafar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

[8]. Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir Sitem)*. Bayumedia. Malang

[9]. Gedeona, Hendrikus Triwibawanto,2010. "Pandangan Ilmu Administrasi Publik Mengenai Signifikansi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik. STIA LAN* Bandung: 7(4): 308-318

[10]. Suciati. 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. *Magister Tesis* Universitas Diponegoro. Semarang

[11]. Yulianti, Yoni, 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok. Artikel. Universiatas Andalas. Padang

[12]. Firmansyah, saca. 2009. Partisipasi Masyarakat. http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/ Diakses pada 29 Juli 2013.

[13]. Ashari, Fahri. 2008.Hubungan Kemampuan Manajerial Aparat Pemerintah Desa Dengan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa-Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara). *Magister Tesis* Universitas Sumatera Utara.